

Kasus Korupsi Limbah Sawit, Kejagung Geledah Money Changer di Jakarta

Jakarta, MIMBAR - Kejaksaaan Agung (Kejagung) menggeledah sejumlah tempat jasa penukaran mata uang asing (money changer) di Jakarta.

Pengeledahan itu terkait dengan kasus dugaan korupsi ekspor palm oil mill effluent (POME) atau

■ Bersambung ke Hal 11



657 Ribu Siswa dan 56 Ribu Guru Jadi Korban Banjir Sumatra

Jakarta, MIMBAR - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdas-men), Abdul Mu'ti mengungkapkan sebanyak 4.549 lembaga pendidikan ikut terdampak bencana banjir dan longsor hebat di tiga provinsi Sumatra pada akhir November 2025 lalu.

Menurut Mu'ti, kondisi itu menyebabkan layanan pendidikan terhadap 657.193 peserta didik terganggu. Sedangkan, jumlah guru yang ikut terdampak mencapai 56.882 guru.

■ Bersambung ke Hal 11



28 Juta Orang Indonesia Berpotensi Gangguan Mental

Abaikan Federasi Buruh Rico Waas Diminta Evaluasi Plt Kadisnaker Medan

Medan, MIMBAR - Federasi Buruh Kimia Industri dan Pertambangan (KEP-SPSI) Kota Medan menyatakan kekecewaan yang mendalam terhadap kinerja Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Medan.

Kekecewaan itu dilontarkan Ketua KEP-SPSI

■ Bersambung ke Hal 11

Guru di Tangsel Jadi Tersangka Usai Lecehkan 16 Siswa SD

Jakarta, MIMBAR - Polisi menetapkan guru SDN 01 Rawa Buntu, Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel) berinisial YP (54) sebagai tersangka kasus dugaan pencabulan ke 16 siswanya.

"Sudah (tersangka),"

■ Bersambung ke Hal 11

Jadwal Salat

3 SYA'BAN 1447 H

Imsak : 05:09 WIB	Ashar : 16:02 WIB
Subuh : 05:19 WIB	Maghrib : 18:37 WIB
Zuhur : 12:39 WIB	Isya : 19:50 WIB

■ Untuk kota Medan sekitarnya

Hidayah Harus Dianggap Serius

Oleh Dr. A. Rasyid, MA

Pernyataan Menteri Kesehatan Republik Indonesia bahwa sekitar 28 juta orang Indonesia berpotensi mengalami gangguan kesehatan mental sempat memantik perdebatan. Tidak sedikit yang merespons dengan skeptis: "Itu kan hanya dugaan." Namun, justru pada kata dugaan itulah letak persoalan yang paling serius. Angka tersebut bukan alasan untuk meremehkan masalah, melainkan alarm keras bagi bangsa ini.

Memang benar, angka 28 juta bukan hasil diagnosis klinis individual. Ia merupakan estimasi berbasis prevalensi global Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang diterapkan pada jumlah penduduk Indonesia. Dalam

■ Bersambung ke Hal 11



Jakarta, MIMBAR - Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin perkiraan ada 28 juta warga Indonesia yang berpotensi alami gangguan kesehatan mental. Pemerintah pun perkuat sistem layanan kesehatan mental di puskesmas.

Hal ia ungkapkan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI pada Senin, (19/1). Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), prevalensi gangguan kesehatan jiwa secara global berada di angka 1 per 8 orang hingga 1 per 10 orang.

Budi mengalkulasikan, dengan jumlah penduduk Indonesia di angka 280 juta jiwa, setidaknya 28 juta orang berpotensi alami

■ Bersambung ke Hal 11

Aparat Didesak Proses Hukum 28 Perusahaan

Tak Cukup Hanya Cabut Izin

Medan, MIMBAR - Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu) menilai pencabutan izin terhadap 28 perusahaan perusak hutan yang menyebabkan bencana hidrometeorologi banjir dan longsor yang sporadis di tiga provinsi Sumatra pada akhir November 2025 lalu merupakan langkah yang penting. Namun, mereka menilai itu belum cukup untuk menjawab besarnya kerusakan ekologis dan penderitaan masyarakat.

Bakumsu menilai keputusan itu harus dibaca sebagai pengakuan negara atas kegagalan tata kelola sumber daya alam yang selama bertahun-tahun membiarkan pelanggaran berlangsung tanpa penindakan berarti.

"Bencana banjir, longsor, krisis air bersih, hilangnya

■ Bersambung ke Hal 11



Menyorot Arogansi Kepala Dinas Pendidikan Sumut (2) Ketua PWI Sumut Ingatkan Kasus Topan Alex Sinulingga: Wartawan Dilayani di Ruang PPID

POLEMIK larangan wartawan yang bertugas di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan Alexander Sinulingga selaku kepala dinas masih terus bergulir.

"Saya bingung kenapa kok Kadisdik bisa melarang wartawan masuk ke kantor Disdiksu. Apa kantor itu dia punya. Itu punya rakyat. Alexander dikontrak sama gubernur menjadi kepala dinas. Tak ada hak untuk melarang masyarakat datang ke kantor, apalagi wartawan," ujar Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara H Farianda Putra Sinik SE saat ditemui di Kantor PWI Sumut, Kamis (15/1/2026).

Karenanya, Farianda yang didampingi Sahad Rahmat Hamonangan Panggabean dan Wakil Ketua Bidang Organisasi Rikfi Warisan meminta Alexander Sinulingga membaca UU Pers No 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik. Alex harus mengetahui apa konsekuensinya melarang atau menghalang-halangi tugas wartawan.

Dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sudah sangat jelas mengatur sanksi bagi siapa pun yang menghalangi kerja jurnalistik.

Jika tindakan itu terbukti menghambat liputan secara sengaja, maka secara hukum bisa dikenakan sanksi ancaman penjara maksimal dua tahun atau denda hingga Rp 500 juta.

Tidak ada alasan administratif yang dapat membenarkan larangan tersebut dan menjadi delik aduan atas pelanggaran pidana.

■ Bersambung ke Hal 11



Layanan Mobile JKN Disoal RS Martha Friska Batasi Pasien Poliklinik

Medan, MIMBAR - Pembatasan pelayanan pasien BPJS Kesehatan mencuat ke permukaan. Instruksi Gubernur Bobby Nasution pun seolah dianggap angin lalu.

Kali ini terjadi di Rumah Sakit Martha Friska Mutatuli, Medan. Rumah sakit ini diduga membatasi jumlah pasien berobat di poliklinik melalui aplikasi Mobile JKN hanya 14 orang per hari, sehingga menimbulkan kekecewaan dan tanda tanya besar di kalangan peserta BPJS.

Salah satu pasien, Suwani, peserta BPJS kelas rawat 1 sekaligus pasien Program Rujuk Balik (PRB), mengaku kecewa karena tidak bisa mendaftar berobat.

■ Bersambung ke Hal 11



■ Benar-benar gila?

■ Hehehe ...